

Pemkab Boyolali Bagikan Bingkisan Lebaran

BOYOLALI (KR) - Jelang Idul Fitri 1444 Hijriah / 2023 Masehi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali memberikan bingkisan lebaran berupa sembako dan bahan pokok lainnya kepada para petugas kebersihan, buruh gendong di area pasar, dan petugas parkir. Bingkisan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Boyolali M Said Hidayat di Pendapa Gede Kabupaten Boyolali, Selasa (11/4).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Boyolali Hendro Setyo Wibowo, menjelaskan bantuan bingkisan Lebaran berupa sembako yang dibagikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali tahun 2023. Setiap paket sembako yang bernilai Rp 350.000 diberikan kepada 380 orang terdiri dari 125 buruh gendong di lingkungan pasar, kemudian petugas kebersihan 205 orang dan 50 orang petugas parkir. Sembako yang diberikan berisi beras lima kilo, gula pasir, minyak goreng, sirup, susu kental manis, kopi dan teh celup.

Ditambahkan selain pembagian bingkisan dari Pemkab Boyolali, diserahkan pula bantuan sembako dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Boyolali kepada 147 orang senilai Rp 200.000. Pihaknya menyampaikan, pada prinsipnya bantuan yang diberikan ini adalah wujud kepedulian Pemkab Boyolali untuk membantu meringankan biaya dalam rangka menyambut Idul Fitri. **(R-3)-f**



Petugas kebersihan, buruh gendong dan petugas parkir menerima bingkisan Lebaran.

KPU Tetapkan DPS Pemilu 2024

MAGELANG (KR) - Bawaslu Kabupaten Magelang, menemuki 5.330 potensi pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) selama pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). DPHP ini merupakan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh pantarliih. "Secara global, jajaran kami menemukan 5.330 temuan data potensi pemilih TMS. Dari temuan ini pengawas pemilu mengirimkan saran perbaikan (sarper) ke jajaran KPU sesuai tingkatan," kata Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Magelang Sumarni Aini Chabibah, Selasa (11/4).

Menurutnya, mulai tahapan penyusunan DPHP hingga DPS jajaran Bawaslu Kabupaten Magelang telah berkirim surat imbauan dan saran perbaikan sejumlah 50 surat. Imbauan dan sarper dari Bawaslu Kabupaten Magelang ini telah ditindaklanjuti oleh jajaran KPU sesuai tingkatan. "Setelah ditindaklanjuti, KPU Kabupaten Magelang kemudian menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2024 sejumlah 1.011.221 pemilih yang tersebar di 21 kecamatan dan 4.407 TPS. DPS ditetapkan sesuai tahapan yakni pada tanggal 5 April 2023 di Hotel Artos Magelang," ungkapnya.

Disebutkan, tahapan penetapan DPS merupakan rangkain panjang dari tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Pertama, diawali dengan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh pantarliih sekitar satu bulan penuh pada pertengahan Februari hingga pertengahan Maret dilanjutkan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) oleh PPS lalu rekapitulasi DPHP di tingkat desa, tingkat kecamatan dan ditetapkan menjadi DPS di tingkat kabupaten.

Berapapun data temuan jajaran Bawaslu, kata Aini, harus ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya sebagaimana termaktub dalam PKPU nomor 7 tahun 2022 dan perubahannya PKPU nomor 7 tahun 2023. "Jajaran KPU sudah bekerja profesional sesuai ketentuan, hal itu ditunjukkan dengan tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran masukan dari jajaran Bawaslu. **(Bag)-f**

PKS Jateng Rombak Kepengurusan

SEMARANG (KR) - Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, DPW PKS Jawa Tengah melakukan perombakan kepengurusan. Ketua DPW PKS Jateng yang lama Muhammad Haris, diganti oleh ketua yang baru Muhammad Afif. Ketua Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) DPP PKS Jateng Fikri Faqih melantik kepengurusan baru DPTW PKS Jateng periode 2020-2025, Minggu (9/4). Fikri mengatakan perombakan kepengurusan di tubuh PKS merupakan hal biasa terjadi.

Menurut Fikri, tujuan restrukturisasi di tingkat DPTW ini bertujuan untuk optimalisasi, merefresh, dan mempercepat kinerja Pencapaian target kemenangan PKS di Jateng. Selain itu, dinamisasi dalam partai menjadi upaya membangun soliditas di tubuh PKS khususnya PKS Jateng. Fikri yang juga sebagai Wakil Ketua komisi X DPR RI ini menghimbau seluruh kepengurusan PKS di Jawa Tengah melakukan aktivasi struktur yang telah terbentuk. Para Pengurus di tingkat DPD, DPC, juga DPRa diminta kembali menguatkan strukturnya.

"Pengurus harus fokus kerja selain memperkuat struktur, mengoptimalkan tugas-tugas kaderisasi, serta fokus pemenuhan administrasi partai. Hal ini demi membangun organisasi yang rapi dalam struktur dan kerja supaya lebih efektif dalam pelaksanaan rencana kerjanya," Tutur Fikri.

Pria asal Tegal ini juga menegaskan, perombakan struktur kepengurusan di DPW PKS Jawa Tengah sangat penting mengingat provinsi ini merupakan salah satu kunci kemenangan PKS pada Pemilu 2024 mendatang. Jawa Tengah menjadi kunci kemenangan karena memiliki jumlah pemilih terbanyak ketiga di Indonesia, setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Target 15% yang menjadi tujuan PKS pada Pemilu 2024 mendatang, yang terdiri dari 11 kursi DPR RI, 18 Kursi DPRD Jawa Tengah, 239 kursi DPRD di kabupaten/Kota serta memenangkan 12 Pilkada di Jawa Tengah, menjadi tugas besar yang diemban PKS Jateng. **(Bdi)-f**

Mentan Berharap Pertanian di Klaten Jadi Model Nasional

KLATEN (KR) - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo didampingi Bupati Klaten, Sri Mulyani, melakukan panen raya padi IP 400, di Desa Gaden, Kecamatan Trucuk, Klaten, Senin (10/4). Bupati Klaten, Sri Mulyani melaporkan, panen padi di Desa Kalikebo Trucuk, merupakan salah satu bukti keberhasilan Kabupaten Klaten dalam pengembangan Optimalisasi Indeks Pertanaman (OIP)/IP 400. Capaian hasil pertanian setiap bulan, dari bulan Januari hingga Maret 2023 mengalami surplus sekitar 31.000 ton beras.

"Alhamdulillah patut kita syukuri, IP 400 Klaten sudah tercapai sesuai target program. Dengan capaian hasil pertanian yang membanggakan ini, tentunya Kabupaten Klaten aman pangan dan stok beras untuk masyarakat," kata Sri Mulyani. Sri Mulyani menanamkan, untuk mewujudkan Klaten MAPAN (Klaten Mandiri Pangan) dan mengatasi ketergantungan pada pupuk kimia, Pemkab Klaten telah berinovasi dengan program "Gelora Nonik" (Gerakan Langkah Ora Lali Nambah Organik). Melalui pelatihan pembuatan pupuk organik, pelatihan pembuatan biosaka, penyuluhan pada kelompok tani, percontohan di lahan pertanian, dan bantuan pupuk organik.

"Kami berinovasi dengan program Gelora Nonik. Luas lahan yang menggunakan pupuk organik 9.126 hektare, dan yang menggunakan biosaka 250 hektare. Dengan Geloran Nonik ini, diharapkan mampu membantu petani dalam memperbaiki sifat fisik tanah, sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal dan tertanam kebiasaan petani dalam penggunaan pupuk organik," jelas Sri Mulyani.

Selanjutnya, dilakukan penyerahan bantuan Benih Padi kepada Gapoktan Suka Maju dengan luas lahan 90 hektar, bantuan 10.000 batang bibit kelapa kepada Kabupaten Klaten, bantuan KUR pertanian berupa usaha huller senilai Rp 500jt, pertanian padi senilai Rp 150jt, dan budidaya padi senilai Rp 20 juta. Dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama petani untuk mewujudkan 1.000 hektar penanaman padi IP 400.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan Kabupaten Klaten harus menjadi contoh program pertanian yang berskala nasional.

"Klaten harus menjadi contoh program pertanian

yang berskala nasional. Yang paling hebat disini adalah semangat, kemauan, kebersamaan. Kita harus sebarakan etos kerja ini ke daerah lain. Oleh karena itu, terima kasih kepada petani. Tadi sudah sepatok untuk berkomitmen mencukupi 11.000 hektar program IP 400," kata Mentan.

Mentan mengaku bersyuk

kur karena petani di Klaten mampu meningkatkan produktivitas. Kabupaten Klaten berhasil menerapkan empat kali panen dalam musim alias IP400 pada lahan 1000 hektare. Menurut itu, pola tanam semacamnya perlu diperluas agar Indonesia benar-benar berdaulat pangan, mandiri dan modern. **(Sit)-f**



KR-Sri Waesiti

Bupati Klaten dan Mentan tunjukkan hasil panen padi IP400.

Mudik Lebaran Exit Tol Rawan Macet

SALATIGA (KR) - Satlantas Polres Salatiga melakukan monitoring jalur mudik Idul Fitri 1444 H. Dipehatikan terdapat titik rawan kecelakaan dan kemacetan jalur mudik lebaran di Kota Salatiga.

Kemacetan saat arus mudik dan balik dipetakan di kawasan exit tol Tingkir, Salatiga. Sedangkan jalan lingkar selatan (JLS) Salatiga rawan kecelakaan, tepatnya di simpang empat Kumpulrejo, Argomulyo.

Kasat Lantas Polres Salatiga, AKP Betty Nugroho kepada wartawan, Senin (10/4) mengatakan ada dua titik rawan macet di Salatiga, yakni di Jalan Jenderal Sudirman (Jensud) dan jalan raya Salatiga-Suruh (kawasan exit tol). Sementara untuk rawan kecelakaan, dipetakan oleh Satlantas terdapat tiga titik, yaitu JLS Kumpulrejo, simpang tiga Pendem Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Fatmawati," kata Betty Nugroho.

Menurutnya, jalan raya Tingkir Salatiga-Suruh, Kabupaten Semarang menjadi kawasan rawan macet lantaran ada simpang pertemuan arus exit tol Salatiga.

Salah satu penyebabnya, jalan ini sempit dan dua jalur. "Tentu akan terjadi penumpukan kendaraan di persimpangan jalan exit tol," katanya. Untuk mengantisipasi situasi ini, Satlantas Polres Salatiga menyiapkan skema rekayasa arus lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan pada arus mudik.

Ketika jalan Salatiga-Suruh terjadi kemacetan, maka arus dari arah Suruh akan dialihkan masuk ke jalan Desa Tegalwaton menuju Tenganan. Nantinya, skema ini akan diberlakukan secara tentatif dan situasional. Sedangkan untuk kendaraan yang ma-

suk tol dari Kota Salatiga diputar melalui simpang empat Isep-isep Salatiga.

Sementara untuk jalur Salatiga-Kopeng-Magelang jika terjadi kemacetan, arus lalu lintas dialihkan ke Desa Padaan yang akan melintasi simpang empat Promasan. "Sedangkan kemacetan dalam Kota Salatiga arus dipecah melalui Jalan Muwardi," katanya. Untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, Satlantas Polres Salatiga sosialisasi dan memasang himbauan tertulis di beberapa lokasi. Selain itu melakukan patroli dan menempatkan tim respon laka. **(Sus)-f**

Jemput Pemudik, Pemkot Magelang Kirim Dua Bus

MAGELANG (KR) - Dua armada bus akan dikirim dari Kota Magelang untuk menjemput pemudik di Jakarta menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023 mendatang. Setiap bus nantinya berkapasitas 50 tempat duduk.

Di wilayah Kota Magelang nantinya tidak ada penambahan rambu lalu lintas, tetapi lebih efektivitas pengaturan pada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).

Demikian dikemukakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang Candra Wijatmiko Adi SSIT MT kepada KR usai mengikuti upacara peringatan Hari Jadi ke-1117 Kota Magelang Tahun 2023 di alun-alun Kota Magelang, Selasa (11/4). Upacara dipimpin Walikota Magelang dr

HM Nur Aziz SpPD K-GH. Armada dari Kota Magelang nantinya akan berkumpul dan difasilitasi Pemprov Jateng. Nantinya juga akan ada tambahan dari pihak lain.

Selain difasilitasi Pemerintah Kota Magelang, yang diampu Pemprov Jateng, pemudik di Kota Magelang juga ada mudik-mudik gratis yang difasilitasi dari kementerian maupun dari swasta.

Dikatakan, nantinya tidak ada tambahan rambu-rambu lalu lintas. Hanya saja pada efektivitas pengaturan di APIL. Kalau di hari biasanya settingnya nyala lampu hijau lebih panjang di jalan yang minor atau jalan kecil, saat lebaran nanti disesuaikan dengan arus lalu lintas yang ada. Sedang untuk rambu lalu lintas, lebih

banyak disiapkan di fasilitas yang untuk diskresi pengaturan tertentu. Misalnya ada simpang jalan yang ditutup, berarti perlu ada water barrier, traffic coon maupun lainnya.

"Ini yang sudah kita siapkan dari awal," kata Candra sambil menanamkan lebih dari 800 buah yang nanti juga akan dimaksimalkan dengan pihak Kepolisian.

Sementara itu Kapolres Magelang Kota AKBP Yolanda Evalyn Sebayang SIK MM secara terpisah kepada KR mengatakan di wilayah hukum Polres Magelang Kota nantinya akan ditambah 2 buah Pos Pantau, yaitu di daerah Sambung dan Cangkung.

Sehingga nantinya di wilayah hukum Polres Magelang Kota ada 8 pos, salah satunya di wilayah Bandongan Magelang. Selain di Bandongan, Pos tersebut juga ada di Kebonpolo, alun-alun Kota Magelang, sekitar Shopping Centre, Trio, Terminal Tidar, Cangkung dan



KR-Thoha

Walikota Magelang dan Wakil Walikota Magelang memberikan keterangan kepada wartawan.



Mimbar Legislatif



DPRD Jateng Rampungkan LHKPN 100 Persen

WAKIL Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono mengatakan, DPRD Jawa Tengah telah menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 100 persen sebelum 31 Maret 2023.

Penjelasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono disela-sela Rakor Persiapan Mudik Lebaran 2023, pekan lalu. Laporan kekayaan pejabat negara tersebut dilaporkan setiap tahun bagi seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan.

Secara kelembagaan, DPRD Jawa Tengah menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pimpinan dan Anggota Dewan yang sudah melaporkan LHKPN secara tepat waktu, termasuk dukungan dari para pimpinan alat kelengkapan dewan dan unit LHKPN dari Sekretariat DPRD (Setwan). Ketentuan untuk melaporkan LHK-



Ferry Wawan Cahyono

PN telah diatur, termasuk dalam Tata Tertib DPRD.

Yohan Fitriadi selaku Perisalah Legislatif Ahli Muda Setwan Provinsi Jateng menambahkan, disamping sudah ada Unit LHKPN, jajaran Setwan DPRD Jawa Tengah juga melakukan jemput bola untuk membantu input pelaporannya, sehingga pelaporan seluruh anggota Dewan bisa dilakukan tepat waktu.

Staf Unit Pengelola e-LHKPN Setwan DPRD Jawa Tengah Endra menyampaikan, sebanyak 119 Anggota DPRD Jawa Tengah sudah melaporkan LHKPN mereka. Dari total 119 wajib lapor, sudah 100 persen menyampaikan LHKPN sebelum 31 Maret 2023. (*)

(Disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)



KR-Istimewa

Rumah rusak dan satu korban mengalami luka berat akibat ledakan petasan di Desa Bulurejo, Kecamatan Ayah.